

TAHUN 2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

Jl. Raya Kemlagi No. 308

Telp. (0321) 363415

Email : pelayanankecamatankemlagi@gmail.com

Website : <http://kemlagi.mojokertokab.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Kemlagi Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Mojokerto, Januari 2021

CAMAT KEMLAGI


TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.MM

Pembina

NIP. 19681016 199303 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kecamatan Kemlagi tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah serta Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ” dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pencapaian sasaran diukur dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan dan IKM Pelayanan Kecamatan Kemlagi.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) program, yaitu
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Target capaian indikator sasaran tahun 2021 antara lain :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 70%, dengan realisasi tahun 2021 sebesar 66,49%,
 - b. Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan sebesar 81% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 88,5%
 - c. Nilai IKM Pelayanan Kecamatan sebesar 81% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 82,50% sehingga capaian target pada tahun 2021 sebesar 101,9% Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 80,09% terjadi peningkatan sebesar 3,01%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rancangan Kerja Tahunan.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	8
C. Indikator Kinerja Individu	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	19
C. Inovasi.....	28
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Cangkupan Pelayanan Kecamatan Kemelagi.....	29
C. Langkah –Langkah yang Dilaksanakan Untuk Memenuhi Target	30
D. Saran	30
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	
Laporan Kinerja Pejabat Eselon III dan Eselon IV	
Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Umum (Staff)	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Tabel – Tabel	
Matriks Renstra Kecamatan Kemlagi 2021 – 2026	
Struktur Organisasi	
IKU Kecamatan Kemlagi	
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kemlagi Tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Kemlagi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Kemlagi juga dimaksudkan sebagai

pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kemlagi terdiri dari 20 desa dan 74 dusun berada pada bagian utara ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 50,05 km² dan jumlah penduduk **58.104 orang** terdiri dari **L = 29.096, P = 28.918** (*data Laporan Kependudukan Tahun 2021*).

Adapun Peta dan batas – batas wilayah kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut

PETA KECAMATAN KEMLAGI



- Sebelah Utara : Kecamatan Dawarblandong
- Sebelah Timur : Kecamatan Jetis
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gedeg
- Sebelah Barat : Kecamatan Ngusikan Kab.Jombang

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Kemlagi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- d. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kemlagi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kemlagi.

Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kemlagi.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

Faktor Kelemahan Organisasi

1. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kemlagi dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Kemlagi termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Adanya perbaikan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan Public ekonomi masyarakat serta dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke Public Utara Sungai Brantas khususnya Wilayah Kecamatan Kemlagi ;
3. Adanya Produk unggulan dari Kecamatan Kemlagi yaitu Kerajinan Perak dari desa Mojodadi, Japanan ,Kursi Bambu desa mojobebang, dan sangkar burung , Kupuk desa Mojorejo ,Onde –Onde dari desa Tanjungan, Kripik singkong dan kacang Goreng dari desa Mojowatesrejo, jamu tradisional dari Desa Berat Kulon dan Desa Mojosarirejo, Emping Jagung, kripik bothe dari desa Pandan, sangkar ayam dari desa mojopilang, mebel ,lemari, dari desa Mojodadi, Berat Kulon ,Mojojajar dan Mojodowo kerupuk Ladu ,,jamu desa Mojokusumo serta kampong madu desa kemlagi.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
2. Masih banyak aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan baik aparatur kecamatan maupun desa.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kemlagi selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kemlagi tahun 2021 - 2026 yang terdiri dari sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang harus dicapai Kantor Kecamatan Kemlagi pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

KECAMATAN KEMLAGI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	70
		Nilai SAKIP	80,92
2.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81%
		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	79%
		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%
		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%
		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	3.850.073.732,00	PAPBD 2021
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	32.528.830,00	PAPBD 2021
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	88.297.201,00	PAPBD 2021
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	76.000.000,00	PAPBD 2021
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	35.836.775,00	PAPBD 2021

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan / sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terlampir).

C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN KEMLAGI

Camat

1. Nilai Sakip
2. Nilai RB
3. IKM Kecamatan
4. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
5. Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi kecamatan
6. Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan
7. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

Sekretaris Kecamatan

1. Nilai Sakip
2. Nilai RB
3. Rasio pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Jumlah SDM yang menjalankan fungsi sesuai dengan kompetensinya
5. Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sesuai tupoksi
6. Persentase tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Persentase kegiatan Pemkab yang dapat difasilitasi dengan lancar bidang bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
2. Persentase kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dapat dilaksanakan dengan lancar
3. Persentase kegiatan Konflik sosial yang mampu diatasi di kecamatan
4. Jumlah kegiatan penegakan terhadap perundang-undangan daerah

Pengelola Keamanan dan Ketertiban

1. Cakupan hasil pengelolaan keamanan dan ketertiban.
2. Jumlah palaporan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban.
3. Jumlah kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan.
4. Jumlah penertiban melalui patroli gabungan yang dilaksanakan.
5. Jumlah penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

6. Jumlah permasalahan yang berhubungan dengan ketrentaman dan ketertiban yang dapat diinventarisir dan ditindaklanjuti.
7. Jumlah pemantauan kegiatan masyarakat yang memungkinkan terjadinya unjuk rasa yang dilakukan.

Kasi Pelayanan

1. Persentase kegiatan Pemkab yang dapat difasilitasi dengan lancar bidang pelayanan.
2. Persentase kegiatan pelayanan yang dapat dilaksanakan dengan lancar.
3. Jumlah jenis pelayanan PATEN dikecamatan.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan.

Pengolah Data Pelayanan

1. Jumlah surat yang telah diagenda dan didistribusikan.
2. Jumlah laporan barang inventaris.
3. Jumlah laporan perencanaan.
4. Jumlah laporan pelaksanaan tugas.
5. Presentase penyelesaian laporan pelaksanaan tugas dan pengelolaan data administrasi umum

Pengadministrasi Perizinan

1. Jumlah administrasi dokumen perizinn.
2. Jumlah dokumen prosedur perizinan.
3. Jumlah laporan yang disusun.

Kasi Pemerintahan

1. Persentase kegiatan Pemkab yang dapat difasilitasi dengan lancar bidang pemerintahan.
2. Persentase pemerintahan desa yang mampu menyusun Peraturan Desa (PERDES) tepat waktu.
3. Persentase pemerintahan desa yang mampu menyusun Rancangan Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes) tepat waktu.

Pengelola Kekayaan Desa dan Adm Desa

1. Cakupan hasil pengelolaan kekayaan desa dan administrasi desa.
2. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kekayaan desa dan administrasi desa.
3. Jumlah koordinasi yang dilakukan terkait administrasi desa.
4. Jumlah laporan LKPJ dan LPPD Kepala Desa yang disusun.
5. Jumlah laporan anggaran dana desa yang disusun.

Pengelola Adm Pemerintahan

1. Cakupan rumusan hasil pengelolaan administrasi pemerintahan.
2. Jumlah laporan pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Kasi Kemasyarakatan

1. Persentase kegiatan Pemkab yang dapat difasilitasi dengan lancar bidang kemasyarakatan.
2. Persentase kegiatan keagamaan yang dapat difasilitasi dengan lancar bidang kemasyarakatan.

Pengelola Data Bantuan Sosial

1. Jumlah hasil rekapitulasi, seleksi dan analisis data proposal bantuan sosial.
2. Cakupan hasil rekapitulasi, seleksi dan analisis.
3. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan proposal bantuan sosial.

Pengelola Data Kemasyarakatan

1. Cakupan hasil data kemasyarakatan.
2. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.

Kasubag Umum dan Kepegawaian

1. Rasio pemenuhan kebutuhan SDM yang menjalankan fungsi sesuai dengan kompetensinya.
2. Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat sesuai tupoksi.
3. Persentase tindak lanjut temuan APIP.
4. Persentase sarana dan prasarana yang kondisinya baik.
5. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang.
6. Persentase pelayanan kepegawaian yang terpenuhi.
7. Persentase pengelolaan data barang milik negara yang terdata dengan baik.

Pengelola Kepegawaian

1. Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diselesaikan.
2. Jumlah dokumen/berkas administrasi kepegawaian yang terselesaikan.
3. Persentase pengelolaan data kepegawaian dengan benar.
4. Persentase realisasi usulan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Gaji Berkala, Usulan Penghargaan pegawai.
5. Persentase Pengelolaan data administrasi kepegawaian terlaksana sesuai dengan waktunya.

Pengadministrasi Umum

1. Jumlah laporan pelaksanaan tugas.
2. Jumlah laporan barang inventaris.
3. Jumlah laporan perencanaan.
4. Jumlah laporan pelaksanaan tugas.
5. Presentase penyelesaian laporan pelaksanaan tugas dan pengelolaan data administrasi umum.

Pengelola Barang Milik Negara

1. Jumlah kegiatan pengadaan dan pembelian barang.
2. Jumlah laporan barang inventaris.
3. Jumlah jenis barang yang dicatat secara berkala sesuai dengan Kartu Invanetaris Barang (KIB).
4. Persentase pengelolaan data barang milik negara yang terdata dengan baik.
5. Prosentase ketepatan penyusunan laporan barang secara berkala

Pengemudi

1. Cakupan kebersihan dan terawatnya kendaraan operasional.
2. Jumlah pegawai yang diantar dan dijemput dalam rangka operasional pelaksanaan tugas.
3. Pesentase ketepatan waktu pelaksanaan transportasi operasional.
4. Volume mengemudikan kendaraan dalam rangka operasional pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Jumlah pemeriksaan kendaraan dan kelengkapannya.
6. Persentase Pelayanan transportasi kedinasan yang dilaksanakan.

Petugas Keamanan

Cakupan wilayah keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor.

Pramu Kebersihan

Cakupan kebersihan lingkungan.

Kasubag Sungram dan Keu

1. Nilai Reformasi Birokrasi
2. Nilai SAKIP
3. Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun.
4. Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan serta dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu.
5. Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan.
6. Jumlah dokumen pengelola administrasi keuangan.
7. Jumlah laporan keuangan yang disusun.

Analisis Perencanaan Program

1. Jumlah rumusan hasil analisis data perencanaan program.
2. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan program.
3. Persentase penyusunan perencanaan program yang tepat waktu.
4. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun.
5. Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan.

Pengadministrasi Perencanaan dan Program

1. Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu.
2. Jumlah dokumen perencanaan yang diadministrasikan.
3. Jumlah laporan yang disusun.

Pengelola Keu

1. Persentase administrasi pembukuan yang sesuai dengan aturan.
2. Jumlah dokumen keuangan yang disusun.
3. Jumlah laporan pertanggungjawaban.

Verifikator Keu

1. Jumlah laporan keuangan.
2. Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diverifikasi.

3. Jumlah verifikasi dokumen keuangan yang dilaksanakan.

Bendahara

1. Jumlah jenis laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dikerjakan.
2. Prosentase tingkat kesesuaian pertanggungjawaban keuangan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang didokumentasikan.
4. Persentase ketepatan pelaksanaan administrasi keuangan.

Kasi Pembangunan

1. Persentase kegiatan Pemkab yang dapat difasilitasi dengan lancar bidang pembangunan.
2. Persentase kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan lancar.
3. Jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Pengelola Pemberdayaan Masyarakat

1. Cakupan hasil pemberdayaan masyarakat.
2. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Jumlah bahan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengelola Data Seksi Pembangunan

1. Cakupan hasil data pembangunan.
2. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Jumlah bahan dan usulan bantuan keuangan desa.
4. Persentase data musrenbang tingkat kecamatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kemlagi tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 dengan realisasinya, dan dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	70	66,49	94,99%
	Nilai SAKIP	80,92	81,67	101%
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81%	82,5%	102%
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	79%	88,5%	112%
	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%	97,58%	120,5%
	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%	94,07%	116,13%
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	90%	93,67%	104,08%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2019	2020	2021
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	79%	80,96%	85%	88,5%
	Presentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kesejahteraan masyarakat	81%	80%	94%	96%

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir di RENSTRA

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	70	66,49	94,99%
	Nilai SAKIP	80,92	81,67	101%
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81%	82,5%	102%
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	79%	88,5%	112%
	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%	97,58%	120,5%
	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%	94,07%	116,13%
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	90%	93,67%	104,08%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Rasio Nasional	Ket (+/-)
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	66,49	Baik	+
	Nilai SAKIP	81,67	Baik	+
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	82,5%	Baik	+
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	88,5%	Baik	+
	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi kecamatan	97,58%	Baik	+
	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	94,07%	Baik	+
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	93,67%	Baik	+

5. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja tahun 2021 antara lain :

- Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kemlagi.
- Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.
- Tersedianya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kantor.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk tahun 2021 penyerapan anggaran Kecamatan Kemlagi mencapai 73,66 % yaitu dari total anggaran Rp. 4.082.736.538,00 dana yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.007.260.085,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik.

Sedang dana yang tidak dapat direalisasi berasal dari penghematan pemakaian listrik kantor dan sisa anggaran dari realisasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan baik.

7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dengan melihat persentase pencapaian kinerja tahun 2021 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang diberikan di Kecamatan Kemlagi semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kemlagi tahun 2021.

B. REALISASI ANGGARAN

Persentase anggaran pada masing – masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Kecamatan Kemlagi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Alokasi per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Rp	Anggaran %
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Rp 3.850.073.732,-	72,31%
	Nilai SAKIP		
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	Rp 32.528.830,-	98,97%
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		
	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi kecamatan	Rp 88.297.201,-	97,58%
	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	Rp 76.000.000,-	94,07%
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Rp 35.836.775,-	93,67%

Adapun pencapaian kinerja dan pencapaian penyerapan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (.000)	Realisasi (.000)	Capaian %
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	70	66,49	94,99 %	3.850.073.732	2.783.847.335	72,31 %
	Nilai SAKIP	80,92	81,67	101%			
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	IKM Kecamatan	81	82,5	101,9 %	32.528.830	32.195.050	94,25 %
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	79%	88,5%	112,3 %			
	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%	97,58 %	120,5 %	88.297.201	86.160.050	97,58 %
	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%	94,07 %	116,14 %			
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	90%	93,7%	104%	35.836.775	33.567.750	93,7 %

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk tahun 2021 sebagai berikut

Tabel 3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	101,9	94,25	7,65
		Presentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kesejahteraan masyarakat	118,5	96	22,5

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Program / Kegiatan	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	5	8	9
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.082.736.538	3.007.260.085	1.075.476.453
7.01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)					4.082.736.538	3.007.260.085	1.075.476.453
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75%	72,31%	3.850.073.732	2.783.847.335	1.066.226.397
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</i>	90%	98,28%	22.332.335	21.947.400	384.935
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Dapat Tersusun dan Terlaksana Tepat Waktu	4 dokumen	4 dokumen	9.164.060	8.937.050	227.010
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja yang dapat Tersusun	8 dokumen	8 dokumen	13.168.275	13.010.350	157.925
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu</i>	100%	65,27%	2.976.055.778	1.942.363.129	1.033.692.649
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Waktu Pemenuhan Anggaran Kegiatan Seksi dan Sekertariat	14 bulan	14 bulan	2.962.949.178	1.929.714.279	1.033.234.899
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Waktu Pemenuhan Anggaran Kegiatan Seksi dan Sekertariat	14 bulan	14 bulan	13.106.600	12.648.850	457.750
7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi</i>	90%	99,36%	12.000.000	11.923.450	76.550

7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 stell	20 stell	12.000.000	11.923.450	76.550
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	90%	98,11%	332.809.041	326.509.110	6.299.931
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.000.000	7.990.850	9.150
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	218.000.000	212.879.310	5.120.690
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik	12 bulan	12 bulan	47.609.041	47.149.000	460.041
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	9.000.000	8.884.900	115.100
7.01.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan / Material		Jenis Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	32.200.000	32.005.050	194.950
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	18.000.000	17.600.000	400.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	85%	69,30%	72.228.778	50.057.446	22.171.332
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	45.228.778	23.248.486	21.980.292
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	12 bulan	27.000.000	23.697.100	3.302.900
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase pemenuhan pengadaan barang	100%	99,38%	390.000.000	387.589.600	2.410.400

	Daerah		milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					
7.01.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11 unit	11 unit	390.000.000	387.589.600	2.410.400
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	85%	97,33%	44.647.800	43.457.200	1.190.600
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	1 paket	1 paket	24.647.800	23.697.100	950.700
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	4 unit	4 unit	12.000.000	11.833.000	167.000
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	8.000.000	7.927.100	72.900
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	98,97%	32.528.830	32.195.050	333.780
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1080 pelayanan	607 pelayanan	32.528.830	32.195.050	333.780
7.01.02.2.0 4.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	60 pelayanan	1 pelayanan	10.058.680	9.991.850	66.830

7.01.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1020 pelayanan	606 pelayanan	22.470.150	22.203.200	266.950
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan	81%	97,58%	88.297.201	86.160.050	2.137.151
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40 koordinasi	97,58%	88.297.201	86.160.050	2.137.151
7.01.03.2.0 1.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	28 kegiatan	28 kegiatan	45.991.853	44.488.700	1.503.153
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 pembinaan	12 pembinaan	42.305.348	41.671.350	633.998
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	81%	94,07%	76.000.000	71.489.900	4.510.100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 koordinasi	20 koordinasi	76.000.000	71.489.900	4.510.100
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	20 koordinasi	20 koordinasi	52.000.000	48.283.700	3.716.300

7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20 koordinasi	20 koordinasi	24.000.000	23.206.200	793.800
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	93,67%	35.836.775	33.567.750	2.269.025
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	20 desa	20 desa	35.836.775	33.567.750	2.269.025
7.01.06.2.0 1.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	20 desa	20 desa	6.135.490	5.607.500	527.990
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 desa	20 desa	10.556.060	10.070.950	485.110
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 desa	20 desa	1.620.475	1.606.500	13.975
7.01.06.2.0 1.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 desa	20 desa	8.649.750	7.924.850	724.900
7.01.06.2.0 1.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20 desa	20 desa	8.875.000	8.357.950	517.050

Dari data tabel diatas dapat diketahui pencapaian Kinerja secara umum terlaksana dengan baik 73,66% terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.962.949.178,00 dapat terealisasi 65 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.119.787.360,00 dapat terealisasi 96 % . Total Pagu Anggaran sebesar Rp. **4,082,736,538.00**, terealisasi sebesar **Rp. 3.007.260.085,00** sisa anggaran **Rp. 1.075.736.538,00** atau 26,34% .

Sisa Anggaran yang tidak terserap dengan maksimal adalah anggaran **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** yaitu sebesar 65% karena terdapat 4 ASN yang pension dan 2 ASN yang dimutasi selain itu penambahan ASN dilaksanakan di akhir Oktober dengan gaji yang dibebankan pada bulan Desember, serta di sub kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** yaitu terserap sebesar 51% karena adanya peraturan tentang efisiensi anggaran sehingga terdapat pembatasan dalam penggunaan AC sehingga berpengaruh terhadap rendahnya biaya tagihan listrik.

Meskipun anggaran tidak terserap 100% namun sasaran strategis Kecamatan Kemlag tercapai lebih dari 100% dan terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 1.075.736.538,00 (26,34%).

C. Inovasi

Pada tahun 2021, Kecamatan Kemlagi meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang menjadikan simpul pelayanan bagi lembaga/kantor pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan mengembangkan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat melalui inovasi “ **Layar Ramah** “ yaitu Layanan Antar Surat Ke Rumah, dimana petugas atau pemberi layanan wajib mengantar berkas permohonan apabila pemberi pelayanan melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain itu bagi pemberi pelayanan yang berprestasi diberikan *reward* sebagai wujud dari penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari indikator sasaran kinerja Tahun 2021, 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja lebih dari 100 % yaitu persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan yang mencapai 112,3% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 101,9 %

Dengan demikian semua target indikator sasaran kinerja telah tercapai 100 % atau lebih dari sasaran target

Prestasi yang diraih Kecamatan Kemlagi pada tahun 2021 antara lain :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Juara II Lomba Posyandu Lansia | (Desa Mojogebang) |
| 2. Juara I Lomba B2SA | (Desa Mojokumpul) |
| 3. Juara II Lomba Layak Anak | (Desa Betro) |
| 4. Juara II Lomba Gugus Tugas PPA | (Desa Betro) |
| 5. Juara I Lomba Desa Berseri Tingkat Provinsi | (Desa Mojokumpul) |

B. CAKUPAN PELAYANAN KECAMATAN KEMLAGI TAHUN 2021

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Surat keterangan pelayanan Sosial Kemasyarakatan | : | 68 Buah |
| 2. IMB | : | 1 Buah |
| 3. IUM | : | 0 Buah |
| 4. Rekomendasi Permohonan ijin Pengguna Jalan Daerah | : | 0 Buah |
| 5. Rekomendasi Permohonan Ijin Keramaian | : | 5 Buah |
| 6. Evaluasi Rancangan Perdes Apbdes | : | 20 Buah |
| 7. Pengantar Akta Kematian | : | 5 Buah |
| 8. Surat Pernyataan Miskin | : | 65 Buah |
| 9. Surat Dispensasi Nikah | : | 57 Buah |

10. Proposal Bantuan Pembangunan	:	58 Buah
11. Surat Keterangan Waris	:	302 Buah
12. Legalisasi Surat –Surat	:	32 Buah

Persentasi Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan :

$$(537/607) \times 100\% = 88,5\%$$

C. Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun–tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

D. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kemplagi pada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan–kegiatan sebagai berikut :

1. Akan terus diupayakan efisiensi/penghematan pada kegiatan–kegiatan yang dapat ditekan, misalnya pemakaian listrik, telepon, air maupun alat tulis kantor dan kegiatan yang lain.
2. Sikronisasi jumlah kebutuhan barang dan jasa dengan anggaran serta jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKA, BAPPEDA, DPMD, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto, dll.

CAMAT KEMLAGI



TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.MM

Pembina

NIP. 19681016 199003 1 007